

DAFTAR PUSTAKA

- Hot Ibrahim, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Sleman: CV Budi Utama.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, 2008, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maroang. Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya.
- P.A.F, Lamintang, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi Cetakan kedua*, Bandung: Sinar Baru
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: CV Sinar Baru.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol 1 No. 2, Desember 2014.
- La Sina, "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 26 No 21, Januari 2008.
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 12 No 2, Januari 2013.
- Trias Palupi Kurnianingrum, "Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli", *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016.

Wahyu Ramadhani, "*Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*". Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Majalah Paraiatte, "*PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*", Volume 26 Triwulan III 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentag Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atass Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pesiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersi Pungutan Liar